

PWI Kebumen Baksos Bagikan Sembako

KEBUMEN (KR) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kebumen menggelar bakti sosial (baksos) membagi paket sembako kepada warga kurang mampu, khususnya abang becak yang terdampak pandemi Covid-19. Bakti sosial dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021, kerja sama dengan Baznas, Pemkab, Kodim, dan Polres Kebumen. Bupati Kebumen Arif Sugiyanto ikut menyerahkan paket sembako yang pembagiannya dipusatkan di Balai Wartawan Kebumen, Kamis (4/3). Bupati memberi apresiasi karena kegiatan tersebut wujud sinergitas dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Apalagi Kabupaten Kebumen masih harus kerja keras agar terhindar dari kabupaten termiskin di Jateng. Karena itu seluruh komponen masyarakat harus ikut andil dalam upaya pengentasan kemiskinan. "Kebersamaan antara insan pers dengan Baznas, Polres, dan Kodim, sangat luar biasa," tegasnya. Menurut penanggung jawab kegiatan bakti sosial PWI Kebumen, Nanang W Hartono, ada lebih dari 200 paket sembako yang dibagikan. Penerimaannya, mereka yang tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). (Suk)

Vaksinasi Covid-19 Bagi Pedagang

MAGELANG (KR) - Vaksinasi Covid-19 bagi ratusan pedagang pasar di wilayah Kota Magelang rencana dimulai Sabtu (6/3). Rencananya Walikota Magelang dr H Muchamad Nur Aziz SpPD juga akan ikut melakukan pemantauan kegiatan ini. Demikian dikemukakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Catur Fajar Budi Sumarmo, Jumat (5/3). Dikatakan, vaksinasi pada hari Sabtu ini dilaksanakan di Pasar Rejowinangun, Pasar Cacaban dan Pasar Sidomukti. Di tiga pasar yang ada di tengah wilayah Kota Sejuta Bunga ini berbeda jumlahnya. Untuk Pasar Rejowinangun, ada sekitar 250-an pedagang yang masuk daftar mengikuti vaksinasi, khususnya yang memiliki KTP Kota Magelang. Di Pasar Sidomukti sekitar 150 orang, dan di Pasar Cacaban sekitar 96 orang. Untuk Pasar Cacaban, juga pedagang yang memiliki KTP Kabupaten Magelang.

Sedang pelaksanaan vaksinasi di hari kedua, yakni pada Senin (8/3) mendatang, dilaksanakan di Pasar Kebonpolo dan Pasar Gotong Royong. Bila nantinya mencukupi, vaksinasi juga diberlakukan bagi semua pedagang. Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang dr Majid Rahmawanto secara terpisah kepada KR membenarkan Sabtu besok mulai dilaksanakan pemberian suntikan vaksin bagi pedagang di beberapa pasar di Kota Magelang, yaitu di Pasar Rejowinangun, Pasar Cacaban dan Pasar Sidomukti. (Tha)

Pemkab Magelang Siapkan Anggaran Pilkada

MAGELANG (KR) - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sebuah sarana sekaligus upaya mewujudkan sistem demokrasi, serta sebagai langkah merealisasikan kedaulatan rakyat. Hal tersebut disampaikan oleh, Bupati Magelang Zaenal Arifin saat mengikuti acara Podcast bincang pemilu dan demokrasi secara online dari Rumah Dinas Bupati, Kamis (4/3).

Kendati dalam perjalannya selalu diiringi berbagai persoalan, namun hal ini haruslah dipandang sebagai sebuah tantangan sekaligus bagian dari proses pematangan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Daerah yang lebih demokratis. Oleh karena itu, peran Kepala Daerah (Bupati) bertanggung jawab atas kelancaran Pilkada terutama dalam pengelolaan anggaran.

"Kami bersama dengan DPRD mencoba memformulasikan anggaran yang dimintakan oleh KPU dan Bawaslu yang kita total masuk di sekitar Rp 108 miliar. Dan ini harus diupayakan Pemerintah Daerah dalam rangka ikut mensukseskan Pemilihan 2024 yang akan datang," ungkap, Zaenal. Mengenai keamanan dan ketertiban wilayah pada saat Pilkada, Pemerintah akan bersinergi dengan jajaran TNI dan Polri untuk membantu tugas dari Satpol PP serta Linmas yang ditugaskan melaksanakan pengamanan ketertiban wilayah.

Selain itu juga akan ada antisipasi khusus bilamana situasi atau kondisi Pandemi masih berlangsung hingga saat Pilkada 2024 mendatang. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang, Afifudin mengatakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pilkada serentak akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2024. Adapun persiapan yang dilakukan KPU adalah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Bawaslu Kabupaten Magelang untuk mempersiapkan anggaran. (Bag)

M Saleh, Plt Ketua DPD Golkar Purworejo

PURWOREJO (KR) - Pimpinan DPD Partai Golkar Jateng menunjuk Mohammad Saleh ST MEN sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Purworejo. Mohammad Saleh menggantikan Yuli Hastuti SH yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai ketua masa bakti 2016-2021. Pemberhentian sekaligus penunjukan Plt itu dituangkan dalam SK DPD Partai Golkar Jateng Nomor : kep-10/Golkar /III/2021 yang ditandatangani oleh Ketua DPD Partai Golkar Jateng Panggah Susanto dan Sekretaris Juliyatmono pada tanggal 1 Maret 2021. "Memang betul dan prinsipnya kami *nderek dawuh* dengan DPD Partai Golkar Jateng," kata Ketua Harian DPD Partai Golkar Purworejo, Kelik Susilo Ardani, kepada wartawan, Jumat (5/3).

Dalam salinan SK yang beredar di masyarakat, tertulis bahwa sampai tanggal 28 Februari 2021, DPD Partai Golkar Kabupaten Purworejo belum menyelenggarakan Musda X DPD Partai Golkar Kabupaten Purworejo, berdasar surat DPD partai Golkar Propinsi Jawa Tengah Nomor : B.14/Golkar /III/2021, tanggal 15 Februari 2021, perihal instruksi maka perlu diangkat Plt Ketua DPD Partai Golkar Purworejo masa bakti 2016-2021. Plt Ketua DPD Partai Golkar Purworejo bertugas untuk segera melaksanakan Musda X yang sempat beberapa kali tertunda.

Terkait Musda X, Kelik menjelaskan bahwa pengurus sudah merencanakannya tanggal 28 Februari 2021. "Setelah semua disiapkan termasuk undangan, tapi pada tanggal 26 Februari sore, ada surat dari DPD Golkar Provinsi bahwa pelaksanaan musda ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan, dikarenakan sesuatu hal. Selanjutnya, kita serahkan kepada beliau Plt untuk menyelenggarakan Musda X," terangnya. (Jas)

Boyolali Terima 10.000 Dosis Vaksin

BOYOLALI (KR) - Vaksinasi Covid-19 tahap kedua di Kabupaten Boyolali terus dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes). Pada tahap kedua, vaksinasi diprioritaskan pada guru dan pelayan publik. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Boyolali, Ratri S Survivalina, Kamis (4/3) menjelaskan pihaknya mendapat tambahan vaksin 10.000 dosis.

Jumlah tersebut mampu digunakan untuk 5.000 sasaran baru yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perbankan dan melanjutkan vaksinasi ke tenaga pendidik. Bagi tenaga pendidik dan pelayan publik yang

berada di kecamatan, pelaksanaan vaksinasi dilakukan di Puskesmas masing-masing kecamatan. "Kita sediakan sebanyak 2.200 sasaran yang dilaksanakan di kecamatan kecamatan 22 kecamatan. Jadi per kecamatan ada 100 sasaran," terangnya. Selain itu, pihaknya menyediakan empat lokasi yang dapat digunakan untuk melakukan vaksinasi bagi pelayan publik terutama OPD. Masing-masing Dinkes Kabupaten Boyolali, Kompleks Perkantoran Terpadu di kawasan Alun-alun Lor untuk pegawai Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak (DP2KBP3A) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP). Selanjutnya, di Pendapa Gede yang digunakan oleh OPD sekitar seperti Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D), Badan Keuangan Daerah (BKD) dan lainnya, dan Kantor Dinas Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja (Diskopnaker) yang digunakan vaksinasi pegawai kompleks perkantoran sebelah selatan seperti Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Pertanian dan lainnya.

"Setiap kali kita mendapatkan tambahan dropping vaksin langsung kita distribusikan langsung kita tindakan untuk pelaksanaan," jelasnya. Sementara itu, un-

tuk pedagang pasar dan lansia, pihaknya telah mengumpulkan data yang selanjutnya akan dilakukan vaksinasi dengan perlakuan khusus. "Masyarakat berkesadaran tinggi untuk melaksanakan vaksin itu

nanti akan muncul kekebalan komunal atau kekebalan kelompok. Dengan adanya kekebalan kelompok tersebut nanti dengan peralihan kasus Covid-19 itu akan menghilang dengan sendirinya," harap Lina. (*-1)



KR-Mulyawan

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Boyolali.

DUGAAN PELANGGARAN IZIN MINIMARKET

Disoal LSM, Polisi Siap Usut Tuntas

SALATIGA (KR) - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Pencegahan Korupsi dan Pungli (PKP) Jateng-DIY menyoal dugaan adanya pelanggaran dalam pemberian izin pendirian minimarket jejaring nasional yang berada di Salatiga.

Sementara itu, Polres Salatiga siap untuk mengusut bila ditemukan bukti oknum yang melanggar mengenai perizinan dan lainnya. Hal tersebut terungkap saat pertemuan antara Walikota Salatiga Yuliyanto bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Salatiga dengan pengiat LSM PKP di rumah dinas Walikota Salatiga, Rabu (3/3).

"Kami menemukan banyak masalah mengenai berdirinya beberapa minimarket (toko modern) yang ada dugaan pelanggaran. Saat ini kami sudah melakukan investigasi dan data akan kami serahkan kepada walikota dan publik dalam beberapa hari ke de-

pan. Ini wujud cinta kami terhadap Kota Salatiga, bukan kami mengobok-obok. Bahkan sudah kami temukan dugaan pemalsuan tandatangan," tandas Ketua LSM PKP Jateng-DIY Suyana Hadi P di hadapan Forkompinda dan Walikota Salatiga.

Kapolres Salatiga AKBP Rahmat Hidayat menegaskan pihaknya selaku aparat mendukung penuh terhadap peningkatan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Namun demikian, apabila dalam proses perizinan dan lainnya yang menyangkut pelanggaran yang berujung tindakan melawan hukum pihaknya siap untuk menerima laporan dan memproses-

nya sampai tuntas.

"Kami siap mengusut oknum yang melanggar hukum dalam proses perizinan minimarket. Saat ini juga ada Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polres Salatiga yang dipimpin oleh Waka Polres," tandas AKBP Rahmat Hidayat di hadapan beberapa aktivis LSM PKP, Rabu (3/3).

Walikota Salatiga Yuliyanto menegaskan jumlah minimarket di Salatiga sampai awal 2021 ini 50 lokasi dan menyerap ratusan tenaga kerja (naker).

Selain itu keberadaan minimarket jejaring nasional ini juga membantu menyediakan pembayaran online Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Jumlah minimarket di Salatiga kurang lebih 50 lokasi dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 500 orang dengan estimasi satu minimarket sebanyak 10 orang. Izin pendirian dikeluarkan

semuanya sudah melalui kajian. Kami tidak boleh diskriminasi dalam melayani," tandas Yuliyanto di rumah dinas Walikota Salatiga.

Keberadaan minimarket jejaring nasional di Salatiga ini menurutnya juga ikut memudahkan masyarakat dalam membayar pajak bumi bangunan (PBB), khususnya bagi mereka yang tinggal di luar Kota Salatiga melalui online.

"Kami memang melakukan pengecatan perizinan toko modern (minimarket) jejaring nasional, tapi kami tetap membuka investor selama pengelola toko modern berkomitmen untuk mengikuti perda Salatiga, yakni memprioritaskan pekerja warga Salatiga dan memberi ruang untuk UMKM. Saat ini ada 125 UMKM yang menjadi mitra di toko modern yang tersebar di Salatiga," katanya. (Sus)

Pembawa Virus Korona Inggris Diisolasi

SEMARANG (KR) - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memastikan, tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang membawa varian baru virus korona Inggris atau dikenal dengan B.1.1.7 di Brebes, saat ini sudah menjalani isolasi mandiri. Ganjar Pranowo mengatakan hal ini kepada wartawan di Semarang Jumat (5/3). Setidaknya ada delapan orang yang memiliki kontak erat dengannya, juga sudah diisolasi di rumahnya dengan pengawasan ketat. Mereka pun sudah diambil sample darahnya dan pengujian dilakukan di Jakarta.

"Sudah saya cek, sudah dilakukan tracing kurang lebih ada delapan orang yang berhubungan erat dan sudah dites semuanya pagi tadi dan hasilnya dikirim langsung ke Jakarta, sehingga nanti kita akan nunggu hasilnya beberapa hari lagi," tutur Ganjar Pranowo. Sambil menunggu hasil tesnya, mereka saat ini menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Isolasi juga dijaga dengan ketat. Namun dirinya berharap, mereka bisa dipindahkan ke tempat isolasi yang terpusat. Gubernur juga sudah melakukan komunikasi dengan Sekda Brebes dan sudah



KR-Budiono

Ganjar Pranowo

menerima laporan semuanya.

Ganjar mengatakan, dirinya langsung berkomunikasi dengan Sekda Brebes saat kabar ini muncul. Ganjar minta agar Satgas COVID-19 di Brebes mempercepat proses tracing dan memastikan mereka yang kontak erat langsung diisolasi. "Untuk sementara kita karantina mereka yang be-

lut-betul tidak berhubungan dengan orang lain sambil dipantau. Tapi nggak perlu ditakut-takuti, yang penting dipantau saja dan dibantu segala sesuatunya agar nyaman," ujarnya. Terlepas dari itu, Ganjar mengimbau agar masyarakat, tidak hanya di Brebes, tetap menjaga ke-disiplinan protokol kesehatan. Hal itu untuk mencegah penularan Covid-19 sembari mempercepat proses vaksinasi pada lansia yang berisiko tinggi terpapar. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dua orang warga Karawang (Jabar), yang menjadi TKI di Arab Saudi pulang ke Indonesia membawa varian baru virus korona Inggris. Mereka adalah M dan A, berjenis kelamin perempuan. M merupakan warga Kecamatan Lemah Abang dan A asal Kecamatan Pedes. (Bdi)

Bapemperda Garap Raperda Pemberdayaan Ormas

SEMARANG (KR) - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jateng H Iskandar Zulkarnain, mengatakan saat ini lembaga yang dipimpinnya tengah melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemberdayaan Organisasi Masyarakat (Ormas). Iskandar Zulkarnain mengatakan hal ini kepada wartawan di Semarang, Jumat (5/3). Banyaknya Ormas di Jateng, seperti Ormas keagamaan, sosial kemasyarakatan, budaya hingga persoalan Perempuan dan Anak, harus ada aturan untuk menaungi mereka.

Bapemperda memprioritaskan penyusunan Raperda Ormas guna memfasilitasi perihal itu. Setidaknya di Jawa engah terdapat 681 Ormas dari berbagai unsur yang terdaftar di Kesbangpol Jateng di tahun 2021. "Kaitannya dengan penyusunan ini, Bapemperda DPRD Jateng sengaja berguru ke Solo. Diketahui Solo telah memiliki aplikasi Online pendaftaran dan pemantauan Ormas bernama MAPAN OM. Selain itu, Solo juga kerap disebut sebagai basis dari adanya cikal bakal Ormas radikal," tutur Zulkarnain.

Zulkarnain mengatakan, kehadiran Raperda Pemberdayaan Ormas sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Diakui ini banyak berbagai permasalahan yang terkait dengan Ormas. Meski mereka sepekat adanya paham Pancasila, tetapi di luar faktanya masih meresahkan. Wakil Ketua Bapemperda Bambang Eko Purnomo mengatakan, menyusun penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 16 Tahun 2017, Mendagri minta daerah untuk merancang Perda Pemberdayaan Ormas untuk kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat. (Bdi)

Polres Boyolali Aktifkan Polisi Virtual

BOYOLALI (KR) - Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Polisi Virtual, Kepolisian Resort (Polres) Boyolali melakukan persiapan untuk memulai kegiatan tersebut. Dijelaskan Kanit II Tipidus Polres Boyolali, Iptu Joko Purwadi mewakili Kapolres Boyolali, AKBP Morry Ermond, Polres Boyolali telah membentuk tim satuan tugas (Satgas) Polisi Virtual. Satgas ini terdiri dari anggota reskrim, humas dan intel yang akan bertugas mengontrol segala bentuk penyebaran berita bohong SARA, hoaks dan penipuan.

Kemudian langkah selanjutnya adalah pemantauan akun media sosial Satker yang merupakan

akun yang terverifikasi milik Satker setempat, sehingga apabila terdapat aduan bisa langsung terkonfirmasi melalui akun tersebut. Selain sebagai wadah aduan, akun media sosial ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi sosial yang positif kepada masyarakat.

Selanjutnya tim satuan tugas Polisi Virtual akan bergabung dengan media-media sosial yang ada di daerah (Boyolali) untuk memantau berbagai informasi yang beredar di masyarakat. Selain itu untuk mensosialisasikan mengenai pelanggaran pidana maya (cyber crime), Polres Boyolali membuat konten-konten kreatif media sosial berupa himbauan tentang bentuk pelang-

garan pidana tersebut.

Joko Purwadi menambahkan salah satu langkah yang diambil untuk mensosialisasikan tentang pelanggaran di dunia maya (cyber crime) adalah melalui influencer yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali. Para influencer diharapkan selalu memberikan imbauan-imbauan positif. Selain itu pihaknya juga akan melakukan pemantauan berita yang tersebar di media-media sosial dilakukan oleh anggota Patrol cyber.

Sebagai informasi, tindakan untuk melanggar pidana maya dilakukan secara humanis. Sebagai contoh jika ada akun media sosial yang melakukan penyebaran berita hoaks akan lang-

sung diberikan peringatan untuk tidak disebarkan atau berpotensi menimbulkan pelanggaran pidana. Penyebar hoaks terancam Pasal 28 Ayat 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong

dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik". Hal tersebut dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45 A Ayat (1) UU 19 tahun 2016 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar," ujar Iptu Joko Purwadi. (*-1)



KR-Mulyawan

Iptu Joko Purwadi